

**PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM EKONOMI
HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF PAJAK DAN
KEPATUHAN LINGKUNGAN BAGI
PERUSAHAAN DI INDONESIA**

TESIS

OLEH: YUNI MAHARANI NUR FAHMI

NPM: 202320252011



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM
EKONOMI HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF
PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN BAGI
PERUSAHAAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : YUNI MAHARANINUR FAHMI

NPM : 202320252011

Program : Magister

Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 31 Juli 2025

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H

NIDN: 0319046403

Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum

NIDN. 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM
EKONOMI HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF
PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN
BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : YUNI MAHARANINUR FAHMI

Nomor Induk Mahasiswa : 202320252011

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Tesis : 25 Juli 2025

Jakarta, Juli 2025

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Prof. Dr. M.S Tumanggor, S.H., M.Si., CTA**
NIDK. 9990295046

Penguji I : **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H**
NIDN. 0319046403

Penguji II : **Dr. H. Syahrir Kuba, S.SOS., S.IK., S.H., M.M., M.H**
NIDK. 08847290019

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804

Dekan
Fakultas Hukum



Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo S.H., M.Hum
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Tesis : PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM
EKONOMI HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF
PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN
BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : YUNI MAHARANINUR FAHMI

Nomor Induk Mahasiswa : 202320252011

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Pengaturan Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Hijau: Kajian Atas Insentif Pajak Dan Kepatuhan Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



YUNI MAHARANINUR FAHMI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI MAHARANINUR FAHMI

NPM : 202320252011

TTL :

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM EKONOMI HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA."**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



YUNI MAHARANINUR FAHMI

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konstruksi hukum bisnis dalam pengaturan insentif pajak berbasis kepatuhan lingkungan sebagai instrumen transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Dalam kerangka hukum bisnis, pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tidak hanya merupakan kebijakan fiskal, melainkan juga mencerminkan bentuk hubungan hukum yang bersifat regulatory contract antara negara dan pelaku usaha. Hubungan ini bersifat normatif-implementatif dan mengikat melalui regulasi administratif, bukan melalui kontrak privat, serta didasari oleh prinsip good faith, mutual accountability, dan strict liability atas kewajiban lingkungan.

Namun demikian, penerapan kebijakan insentif fiskal hijau masih menghadapi sejumlah hambatan. Secara normatif, belum terdapat ketentuan eksplisit mengenai sanksi atau mekanisme evaluasi keberlanjutan pasca pemberian insentif. Secara kelembagaan, koordinasi antara instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BKPM masih belum terintegrasi, sehingga menimbulkan celah dalam pengawasan dan pelaporan. Akibatnya, insentif berpotensi disalahgunakan sebagai formalitas administratif tanpa memberikan dampak riil terhadap pelestarian lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan wawancara untuk menggambarkan hubungan antara hukum fiskal dan kepatuhan lingkungan dalam praktik. Temuan menunjukkan bahwa hukum bisnis harus memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan fiskal dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan perbaikan tata kelola kelembagaan menjadi syarat mutlak untuk menjadikan insentif fiskal sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Insentif Fiskal Hijau, Kepatuhan Lingkungan, Hukum Bisnis

ABSTRACT

This study explores the legal construction of business law in regulating tax incentives based on environmental compliance as an instrument for the transition toward a green economy in Indonesia. Within the framework of business law, the provision of fiscal incentives such as tax holidays, tax allowances, and super deductions is not merely a fiscal policy but also reflects a legal relationship in the form of a regulatory contract between the state and business actors. This relationship is normative-implementative and binding through administrative regulation rather than private contracts, and it is based on the principles of good faith, mutual accountability, and strict liability regarding environmental obligations.

However, the implementation of green fiscal incentive policies still faces several obstacles. Normatively, there is a lack of explicit provisions regarding sanctions or sustainability evaluation mechanisms following the granting of incentives. Institutionally, coordination among relevant agencies such as the Directorate General of Taxes, the Ministry of Environment and Forestry, and the Investment Coordinating Board (BKPM) remains fragmented, creating gaps in monitoring and reporting. As a result, incentives risk being misused as administrative formalities without generating real impact on environmental preservation.

This study employs a normative juridical method with a legislative approach supported by interviews to illustrate the practical relationship between fiscal law and environmental compliance. The findings indicate that business law must play a strategic role as a bridge between fiscal policy and environmental protection. Therefore, regulatory reform and institutional governance improvements are essential to transform fiscal incentives into an effective legal instrument for achieving sustainable development.

Keywords: Green Fiscal Incentives, Environmental Compliance, Business Law

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan tesis, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata dua pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian tesis yang penulis susun berjudul “PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM EKONOMI HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan tesis ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Prof. Dr. ST Laksanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing Materi, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III;
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Kaprodi Progoram Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi;
5. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum Selaku Pembimbing Teknis;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan tesis ini;
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Kerangka Teoritis	13
1.6. Kerangka Konseptual	19
1.7. Kerangka Pemikiran	21
1.8. Penelitian terdahulu	22
1.9. Metode Penelitian	26
BAB II TEORI EKONOMI HIJAU DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA	
2.1. Konsep Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>)	32
2.1.1. Pengertian dan Latar Belakang Ekonomi Hijau	32
2.1.2. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Hijau	33
2.1.3. Pilar Ekonomi Hijau: Keberlanjutan Lingkungan, Efisiensi Sumber Daya, dan Inklusi Sosial	35

2.1.4. Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia Melalui <i>Green Growth Strategy</i>	37
2.2. Hukum Bisnis dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan	40
2.3. Instrumen Hukum dalam Ekonomi Hijau.....	43
2.4. Insentif Pajak dalam Kerangka Ekonomi Hijau	44
2.5. Kepatuhan Lingkungan Perusahaan	50

BAB III PENERAPAN INSENTIF PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN DI INDONESIA

3.1. Skema Umum Insentif Pajak dalam Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia.....	53
3.1.1. Jenis Insentif: <i>Tax Holiday, Tax Allowance, Super Deduction</i> ..	52
3.1.2. Sektor Target Insentif.....	63
3.2. Studi Penerima Insentif Pajak dalam Kerangka Ekonomi Hijau.....	66
3.3. Kepatuhan Lingkungan Perusahaan Penerima Insentif	76

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERKAITAN INSENTIF PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA EKONOMI HIJAU DI INDONESIA

4.1. Konstruksi Hukum Bisnis dalam Pengaturan Insentif Pajak Berbasis Kepatuhan Lingkungan	80
4.2. Hambatan Normatif dan Kelembagaan dalam Implementasi Insentif Fiskal Hijau	93

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP